

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian Indonesia memiliki prospek pengembangan yang sangat baik sebagai penghasil devisa negara di luar sektor industri dan pertambangan. Terdapat beberapa komoditas utama sektor pertanian yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia, salah satu dari sektor pertanian yang sangat berkembang dan memiliki prospek baik ke depan adalah kelapa sawit. Hingga saat ini, Indonesia menempati posisi pertama dalam produksi kelapa sawit di dunia dan sekaligus menjadi negara eksportir kelapa sawit terbesar (Kementan, 2019).

Produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 2018 mencapai 41,67 juta ton. Pada tahun 2022 diproyeksikan produksi kelapa sawit Indonesia akan mencapai 48,44 juta ton. Dengan produksi sebesar itu, net ekspor Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 29,59 juta ton dan sisanya sebesar 18,85 juta ton digunakan untuk konsumsi domestik, yakni yang diserap pada industri pengolahan kelapa sawit (Setjen Perkebunan, 2018).

Keberadaan industri kelapa sawit Indonesia yang menghasilkan minyak kelapa sawit dan turunannya menjadi andalan utama ekspor komoditas perkebunan. Untuk terus meningkatkan ekspor kelapa sawit ke negara-negara tujuan utama seperti India, Uni Eropa, Bangladesh, Singapura dan negara lainnya, Indonesia terus berupaya meningkatkan kinerja perdagangan dengan melakukan serangkaian perjanjian perdagangan bebas baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Indonesia perlu membangun kerjasama ekonomi komprehensif secara bilateral dengan negara-negara yang memiliki potensi besar dan strategis untuk mengamankan kinerja perdagangan dan memastikan akses pasar hingga mampu bersaing di era globalisasi. Salah satu mekanisme kerja sama ekonomi yang dilakukan Indonesia untuk membuka pasar luar negeri bagi ekspor Indonesia yaitu dengan keikutsertaan pada berbagai kerja sama ekonomi dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*).

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa tarif ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Indonesia secara aktif bergabung dalam beberapa FTA untuk memudahkan para eksportir di Indonesia dalam kegiatan perdagangan. Kemudahan yang dapat diperoleh oleh FTA adalah pengurangan biaya karena penghapusan atau pengurangan tarif, prosedur dan peraturan dengan negara mitra (Akhmadi, 2017). Dengan demikian hal ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

ASEAN- India Free Trade Agreement (AIFTA) merupakan salah satu perjanjian ekonomi regional yang pada tahun 2010 telah ditandatangani oleh Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara Negaranegara ASEAN dengan India. Setelah diadakan Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan India.

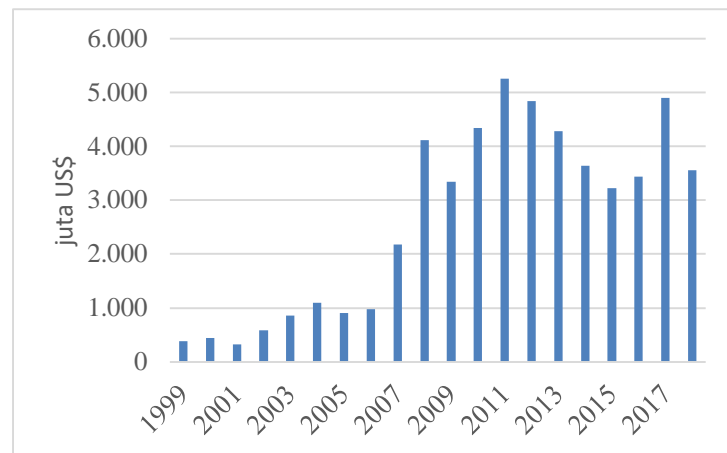
India merupakan sebuah negara di Asia selatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 1,3 miliar, dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran

wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an dan menjadi negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia. Ekonomi India adalah keempat terbesar di dunia dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 2,7 triliun US\$ (UN Comtrade, 2019), dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan jumlah persentase pertumbuhan sebesar 7,3 % (Kemenko Perekonomian, 2019). Hal tersebut menjadikan India sebagai negara tujuan ekspor dengan potensi besar untuk pengembangan ekspor kelapa sawit Indonesia yang notabenehnya Indonesia lebih banyak mengekspor kelapa sawit ke India dari pada ke negara-negara ASEAN.

Ekspor kelapa sawit Indonesia ke India sejak tahun 1999-2009 cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 1999 Indonesia mengekspor kelapa sawit senilai 382 juta US\$ dan terus meningkat secara perlahan hingga 2006, di tahun 2007 Indonesia mengekspor kelapa sawit dengan jumlah 2 kali lipat di bandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 2,180 juta US\$ dan terus meningkat hingga tahun 2009 dengan total ekspor senilai 3,339 juta US\$.

Setelah diberlakukannya AFTA, pada tahun 2010-2018 ekspor kelapa sawit Indonesia ke India cenderung mengalami fluktuasi namun dengan tren yang meningkat. Pada tahun 2010 nilai ekspor kelapa sawit ke India sebesar 4,340 juta US\$ kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2011 dengan nilai 5,256 juta US\$ tapi pada tahun 2012 hingga 2015 Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis dengan nilai ekspor pada tahun 2015 hanya sebesar 3,217 juta US\$. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 ekspor kelapa sawit Indonesia kembali mengalami peningkatan yang besar. Di tahun 2018 jumlah eksport kelapa sawit ke India kembali mengalami penurunan dengan nilai ekspor sebesar 3,559 juta US\$.

Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 mengenai ekspor kelapa sawit Indonesia ke India.



Gambar 1. Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke India 1999-2018

Sumber : Diolah dari (UN Comtrade, 2019).

Indonesia dan India memiliki keinginan yang sama untuk saling meningkatkan dan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Indian melalui *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* di satu sisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perdagangan karena komoditas kelapa sawit Indonesia akan memiliki pasar yang lebih besar dan mendapatkan prosedur perdagangan yang lebih efisien dalam AIFTA. Tetapi pada saat yang sama, kerjasama dalam AIFTA juga memberikan lebih banyak akses bagi negara India ke pasar Indonesia, ini berarti akan mengancam komoditas pertanian domestik karena mereka akan bersaing dengan produk impor negara lain yang mungkin lebih murah dan lebih berkualitas.

AIFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan guna meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Penelitian sebelumnya terkait perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India (AIFTA) telah banyak dilakukan, namun

penelitian tentang dampak perjanjian perdagangan bebas AIFTA terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia masih belum ditemukan. Beberapa mengenai AIFTA misalnya penerapan ASEAN-India free trade area (AIFTA) terhadap perdagangan dua negara Indonesia dengan India yang mana tidak memiliki pengaruh terhadap perdagangan di antara dua negara tersebut (Yulianto & Djermor, 2018) kemudian dampak FTA Indonesia-India terhadap sektor pertanian dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan dengan menggunakan model *Global Trade Analysis Project* yang dikaitkan dengan model keseimbangan umum (CGE) (Kustiari, 2017). Penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Bernaz, 2019) tentang fluktuasi ekspor CPO Indonesia ke India setelah ratifikasi AIFTA dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat manfaat yang signifikan bagi ekspor CPO Indonesia.

Menurut eksplorasi di atas, menarik untuk dikaji apakah perjanjian perdagangan bebas Asean-India (AIFTA) berpengaruh terhadap kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia. Juga penting untuk mengetahui apakah fakta-fakta ini berpengaruh pada keputusan Indonesia untuk berpartisipasi dalam perjanjian perdagangan bebas. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ekonomi dari perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India (AIFTA) pada ekspor pertanian komoditas kelapa sawit Indonesia.

B. Tujuan

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kelapa sawit Indonesia ke negara importir setelah diratifikasinya AIFTA.
2. Mengetahui dampak dari perjanjian perdagangan bebas ASEAN-India (AIFTA) terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia.

C. Manfaat penelitian

1. Sebagai bahan kajian ulang pemerintah untuk pertimbangan keputusan membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain.
2. Dampak perjanjian perdagangan ASEAN-India (AIFTA) pada ekspor kelapa sawit dapat diidentifikasi dan digunakan untuk implikasi kebijakan mengenai pengembangan komoditas ekspor kelapa sawit untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. Juga, studi ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan komoditas kompetitif dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas.